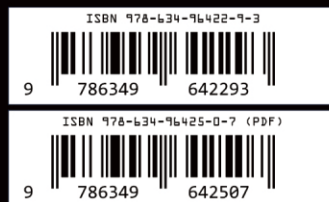


Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., Dkt

HUKUM PERDATA DAN ACARA PERDATA

# HUKUM PERDATA DAN ACARA PERDATA

Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.  
Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



Penerbit Utan Kayu  
Jalan HOS. Cokroaminoto Kab. Pringsewu  
Lampung - Indonesia, 35373  
Email: [admin@ukinstitute.org](mailto:admin@ukinstitute.org)  
Phone/WA: +62 811 669 662

# **Hukum Perdata dan Acara Perdata**

Abdul Halim, S.Pd., M.Pd  
Drs. Berchah Pitoewas, M.H

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **Hukum Perdata dan Acara Perdata**

Abdul Halim, S.Pd., M.Pd  
Drs. Berchah Pitoewas, M.H

UTAN KAYU

**Hukum Perdata dan Acara Perdata**

**Abdul Halim, S.Pd., M.Pd  
Drs. Berchah Pitoewas, M.H**

Editor :  
**Hamid Mukhlis**

Desain Cover dan Tata Letak :  
**Ringga Prataswi**

Ukuran :  
**xiv, 214, Uk: 15.5x23 cm**

ISBN: 978-634-96422-9-3 (Print)  
ISBN: 978-634-96425-0-7 (Ebook)

**DOI:** [https://doi.org/10.47679/20251004\\_12](https://doi.org/10.47679/20251004_12)

Cetakan Pertama:  
**September 2025**

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab penerbit

---

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT UTAN KAYU**  
**(Grup Penerbitan CV HIJAU AMPAT MADILA-HAMID)**  
Anggota IKAPI (018/LPU/2024)

Lucky Arya Residence 2 No.18. Fajar Agung Barat  
Jalan HOS. Cokroaminoto Kabupaten Pringsewu, Lampung-Indonesia 35373  
HP/WA. 0811-198-202 | Web: <https://ukinstitute.org/books> | E-mail:  
[admin@ukinstitute.org](mailto:admin@ukinstitute.org)



## KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ajar dengan judul *Hukum Perdata dan Acara Perdata* ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini disusun dengan tujuan utama untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah *Hukum Perdata dan Acara Perdata* di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PPKn/Civic Hukum dan program studi lainnya. Mata kuliah ini memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam pembentukan keilmuan mahasiswa hukum, karena membahas tentang aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, yakni hak dan kewajiban perdata, serta tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan.

Hukum perdata sebagai salah satu cabang hukum privat mengatur hubungan antarindividu, baik dalam ranah keluarga, perjanjian, maupun harta kekayaan. Sementara itu, hukum acara perdata memberikan mekanisme formal bagaimana hak-hak tersebut dapat ditegakkan atau dipertahankan apabila terjadi perselisihan di hadapan pengadilan. Dengan memahami kedua bidang ini secara komprehensif, mahasiswa tidak hanya akan memperoleh pengetahuan teoretis, melainkan juga wawasan praktis yang dapat menjadi bekal dalam menghadapi dunia profesi hukum.

Dalam penyusunan buku ini, penulis berupaya menyajikan materi secara sistematis, mulai dari pengertian dasar, asas-asas hukum, ruang lingkup, hingga pembahasan kasus-kasus aktual yang relevan. Bahasa yang digunakan diusahakan sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang. Selain itu, penulis juga menyertakan rujukan dari literatur klasik maupun kontemporer, serta perkembangan hukum di Indonesia yang terus mengalami dinamika.

Tentunya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Ilmu hukum bersifat dinamis dan senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, dosen, mahasiswa, maupun praktisi hukum sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat menjadi salah satu referensi

yang bermanfaat, baik bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan, dosen sebagai pengajar, maupun pembaca umum yang tertarik mendalami bidang hukum perdata dan acara perdata. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, September 2025  
Penulis

Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.

## PRAKATA



Buku ini hadir sebagai wujud kontribusi akademik penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya pada mata kuliah *Hukum Perdata dan Acara Perdata*. Materi dalam buku ini disusun secara sistematis mulai dari pengertian, asas, ruang lingkup, hingga mekanisme penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

Tujuan utama penyusunan buku ini adalah membantu mahasiswa memahami materi kuliah secara lebih terarah, serta menjadi panduan praktis dalam mempelajari hukum acara perdata yang bersifat teknis. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur perkuliahan di lingkungan fakultas hukum dan memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan hukum perdata di Indonesia.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa dorongan moral maupun masukan akademis, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat luas dan menjadi sumbangsih nyata bagi dunia pendidikan hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, September 2025

Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I RUANG LINGKUP DAN SUBJEK HUKUM</b> .....	1
Pengertian Ruang Lingkup dan Subjek Hukum.....	1
1. Manusia sebagai Subjek Hukum.....	3
2. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum.....	4
3. Perbedaan Antara Orang dan Badan Hukum.....	8
4. Peran Subjek Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.....	10
Ringkasan Materi.....	11
Latihan Soal.....	12
Jawaban Pertanyaan.....	13
<b>BAB II SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA.</b>	15
Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata.....	15
Sejarah Awal Pemberlakuan Burgerlick Weatbook (BW) di Indonesia.....	19
Penggolongan Penduduk dalam Sistem Hukum Kolonial.....	21
1. Golongan Eropa Meliputi.....	21
2. Golongan Timur Asing.....	22
2. Golongan Bumi (Pribumi).....	22
Kedudukan Hukum Perdata Pasca Proklamasi Kemerdekaan.....	23
Perkembangan dan Perubahan Regulasi Hukum Perdata.....	25
1. Masa Kolonial Belanda (Sebelum 1945).....	25
2. Masa Awal Kemerdekaan (1945 – 1960-an).....	26
3. Masa Transisi dan Nasionalisasi Hukum (1970-an – 1990-an).....	26
4. Era Reformasi (1998 – 2010-an).....	26
5. Masa Konteporer (2010 – 2025).....	27
Perbandingan dan Tantangan Hukum Perdata Perbandingan Hukum Perdata.....	28
Tantangan Hukum Perdata.....	29
Ringkasan Materi.....	30
Soal Essay Dan Jawaban.....	31

<b>BAB III HUKUM PERKAWINAN.....</b>	35
Hukum Perkawinan.....	35
1. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	36
2. Perkawinan Menurut Hukum Agama.....	37
3. Perkawinan Campuran.....	37
Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia.....	38
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	40
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.....	41
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	43
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).....	44
5. Hukum Adat.....	45
6. Putusan MK.....	45
Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Hukum Indonesia.....	46
1. Prinsip Monogami Dengan Pengecualian.....	46
2. Prinsip Kesiapan Fisik dan Psikologis.....	47
3. Prinsip Kesetaraan Hak dan Kewajiban.....	47
4. Prinsip Perkawinan Sebagai Mitsaqan Ghalidzan.....	49
Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Indonesia.....	50
Asas – Asas Perkawinan.....	53
1. Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947.....	53
2. Syarat – Syarat Perkawinan.....	57
Larangan Perkawinan.....	61
1. Larangan Perkawinan yang Bersifat Haram Untuk Selamanya.....	61
Ringkasan Materi.....	65
Latihan Soal.....	66
 <b>BAB IV PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN DALAM SUATU PERKAWINAN SECARA HUKUM PERDATA....</b>	 69
Pengertian Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.....	69
Dasar Hukum Pencegahan Perkawinan.....	73
Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	76
Akibat Hukum dari Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.....	79
Contoh Kasus Pencegahan Perkawinan.....	85
Contoh Kasus Pembatalan Perkawinan.....	86
Ringkasan Materi.....	86
Latihan Soal.....	87

<b>BAB V HAK MILIK</b> .....	91
Definisi Hak Milik.....	91
Dasar Hukum Hak Milik.....	93
Syarat-Syarat Penyerahan Hak Milik .....	98
Hilangnya Hak Milik.....	101
Ringkasan Materi.....	106
Latihan Soal.....	107
<b>BAB VI HUKUM WARIS</b> .....	110
Pengertian Hukum Waris.....	110
Hukum Waris Perdata .....	114
Hukum Waris Adat .....	115
Hukum Waris Islam .....	116
Landasan Hukum KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), Buku II.....	117
Pasal-Pasal Penting dalam KUH Perdata tentang Pewarisan.....	117
Prinsip (Asas) Hukum Waris Perdata.....	118
Relevansi dan Tantangan dalam Praktik.....	119
Ahli Waris dan Sistem Pewarisan.....	119
Ringkasan Materi.....	128
Latihan Soal.....	129
<b>BAB VII HUKUM PERIKATAN BUKU-III KUH PERDATA, KETENTUAN HUKUM</b> .....	133
Hukum Perikatan.....	133
Sistem Hukum Perikatan.....	135
Sumber Hukum Perikatan.....	137
Asas-Asas Umum Hukum Perikatan.....	142
1. Asas Konsensualisme .....	143
2. Asas Pacta Sunt Servanda .....	143
Macam-Macam Perikatan.....	146
1. Perikatan Murni (Bersahaja) .....	146
2. Perikatan Bersyarat .....	147
3. Perikatan dengan Ketetapan Waktu.....	149
4. Perikatan Manasuka .....	150
5. Perikatan Tanggung-Menanggung (Tanggung Renteng).....	151
6. Perikatan Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi.....	153
7. Perikatan Dengan Ancaman Hukum.....	154
Prestasi dan Wanprestasi.....	156
Waprestasi.....	157

1. Waprestasi .....	157
2. Bentuk Wanprestasi .....	158
3. Akibat Wanprestasi .....	159
4. Sanksi.....	159
Unsur-Unsur Ganti Rugi.....	160
Berakhirnya Perikatan .....	162
Ringkasan Materi .....	163
Latihan Soal .....	164

**BAB VIII DASAR HUKUM PERIKATAN YANG LAHIR DARI UU, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERIKATAN LAHIR DARI PERJANJIAN.....** 167

Dasar Hukum Perikatan yang Lahir dari UU Pengertian perikatan .....	167
Pengertian perjanjian.....	169
Pengertian Perikatan Menurut Para Ahli .....	170
1. Hofman.....	171
2. Pitlo .....	172
3. Volmar .....	173
Pengertian Hukum Perikatan.....	175
Sumber Hukum Perikatan.....	179
Unsur-Unsur Hukum Perikatan .....	185
1. Hubungan Hukum Antar Pihak dalam Hukum Perikatan.....	185
2. Kekayaan .....	186
3. Pihak – Pihak .....	188
4. Objek Hukum.....	189
Tujuan Perikatan.....	189
Objek dan Subjek Hukum Perikatan.....	170
Dasar Hukum Perikatan yang Lahir dari UU.....	171
Ringkasan Materi .....	194
Latihan Soal .....	195

**BAB IX KETENTUAN DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DAN DALUARSA.....** 199

Pengertian Hukum Pembuktian dan Daluarsa .....	194
Dasar Hukum.....	200
Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Perdata .....	203
1. Surat.....	203
2. Saksi.....	204
Jenis-Jenis Daluarsa.....	204
1. Daluarsa dalam Hukum Perdata .....	205

2. Daularsa dalam Hukum Pidana .....	205
3. Daluarsa dalam Hukum Administrasi dan Perpajakan.	206
Peran dan Implikasi dalam Praktik Peradilan .....	206
Ringkasan Materi.....	210
Latihan Soal.....	212
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>215</b>

